

## DAFTAR BACAAN

### BUKU/LITERATUR

- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung. 1992
- Effendi, Lutfi. *Pokok Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Harsono, Boedi. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta. 2003
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Parlindungan, A.P. *Konversi Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Setiawan, Yudhi. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.
- Soehino. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Winarsi, Sri. *Kedudukan Badan Pertanahan Nasional di Era Otonomi Daerah*. Airlangga University Press, Surabaya, 2018.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhan dan Daerah Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2880)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 9)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 108)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1147)

## **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 6 September 2018

## **MAKALAH/JURNAL**

Anwar. "Kajian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Studi Pada Kampung Nafri di Kota Jayapura)", *Legal Pluralism*: Vol. 3 No. 2, Juli 2013.

Eman, "Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999". *Jurnal YURIDIKA*: Vol.15 No.3. 2000.